



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK**

Tahun
2025

Hubungi kami



www.dinsos.gresikkab.go.id



[@dinassosialgresik](https://www.instagram.com/dinassosialgresik)



dinsos.gresik@gmail.com

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dasar atau pedoman bagi rencana kerja Tahun ke-empat atas pelaksanaan Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta memuat indikator kinerja dan kelompok sasaran pembangunan yang direncanakan pada tahun 2025. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak senantiasa diharapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada masa yang akan datang khususnya bagi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Gresik, Juli 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19740825 200604 2 016

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	54
BAB V : PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial	25
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	33
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	53
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Gresik merupakan instansi teknis di Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik. Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu diperlukan penyikapan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam wujud visi, misi, tugas pokok dan fungsi, arah kebijakan, program, kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber dana yang lebih tepat agar hasil pembangunan kesejahteraan sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Perangkat Daerah integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk 5 (lima) tahun dan merupakan perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun pada dokumen Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja juga disusun berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Gresik dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Proses Penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pada tahun 2025. Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai Semester I Tahun 2025 menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dan berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan penambahan dan/atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 yang selanjutnya tertuang dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 7 ayat (2) bahwa Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi rakyat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Nomor 3284 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Nomor 2612 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
23. Surat Edaran Bupati Gresik Nomor 050/511/437.71/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Perubahan Lampiran I Surat Edaran Bupati.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik ini disusun dengan maksud:

1. Mencari pemecahan solusi (antipatif) terhadap kebutuhan perangkat daerah untuk masa 1 tahun mendatang.
2. Sebagai bahan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Gresik yang berlaku satu tahun.
3. Sebagai pedoman Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki, instansi yang terkait, pemerhati lingkungan, pengusaha, profesional di bidang pendidikan yang mengarah pada kesadaran generasi mendatang di bidang Sosial.

B. Tujuan

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2025 disusun berpedoman pada Review Renstra II Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini ditujukan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar instansi, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat.
3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat Kabupaten Gresik di bidang Sosial.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang dilaksanakan setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dan penulisan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : HASIL RENJA S/D TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan usulan program dan kegiatan pada Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Review Renstra II Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 beserta indikator, target serta pagu indikatif untuk Tahun 2025 dan 2026.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Dinas Sosial Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2025 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2025.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025, dilaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 25.303.677.710,83 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 7.690.038.395,86. Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2024 dan capaian kinerja program dan kegiatan sampai Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 (T-C.29).

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja PD s/d tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10	11 = 10 / 4
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50%	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen

1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	1 laporan	16,67%	6 laporan	6 laporan	6 laporan
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	5 laporan	0 laporan	0%	5 laporan	5 laporan	5 laporan
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan ASN Dinsos	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	23 orang	27 orang	27 orang	100%	27 orang	27 orang	27 orang
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0%	1 paket	1 paket	1 paket
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	3 paket	1 paket	33,33%	3 paket	3 paket	3 paket

1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	2 paket	0 paket	0%	2 paket	2 paket	2 paket
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	0 paket	0%	3 paket	3 paket	3 paket
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	0 paket	0%	3 paket	3 paket	3 paket
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	43 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 laporan	50 laporan	35 laporan	15 laporan	42,85%	35 laporan	35 laporan	35 laporan
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit kendaraan roda 4	-	-	-	-	-	-	-

1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	5 laporan
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	26 laporan	26 laporan	26 laporan	100%	26 laporan	26 laporan	26 laporan
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	9 unit	9 unit	4 unit	44,44%	9 unit	9 unit	9 unit
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	30 unit	30 unit	2 unit	6,67%	30 unit	30 unit	30 unit
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0%	1 unit	1 unit	1 unit

1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	100,00%	98,48%	97,46%	65,30%	67%	97,46%	97,46%	97,46%
		Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	100,00%	100%	100%	67%	67%	100%	100%	100%
		Persentase Puskesmas yang terbentuk	100,00%	97,19%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan pengumpulan sumbangan sesuai aturan yang berlaku	4 kali	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terbina	100,00%	106,58%	100%	67%	67%	100%	100%	100%
		Jumlah PSKS yang difasilitasi	13 lembaga	13 lembaga	13 lembaga	9 lembaga	69,23%	13 lembaga	13 lembaga	13 lembaga

1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Gresik	40 orang	40 orang	40 orang	0 orang	0%	40 orang	40 orang	40 orang
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	100%	18 orang	18 orang	18 orang
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	13 lembaga	13 lembaga	13 lembaga	13 lembaga	100%	13 lembaga	13 lembaga	13 lembaga
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	0 sertifikat	0%	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	0,37%	0,63%	0,35%	0,28%	80%	0,35%	0,35%	0,35%

		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	3,08%	3,89%	2,8%	2,24%	80%	2,8%	2,8%	2,8%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang tertangani	1,44%	3,88%	1,4%	0,35%	25%	1,4%	1,4%	1,4%
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	44938 orang	27.559 Orang	17.704 Orang	16.486 Orang	93,12%	17.704 Orang	17.704 Orang	17.704 Orang
		Nilai Kabupaten Layak Lansia	80	89,70	79	20	25,31%	79	79	79
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	27 orang	25 orang	0 orang	0%	25 orang	25 orang	25 orang
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	43.650 orang	27.283 orang	17.484 Orang	16.456 Orang	94,12%	17.484 Orang	17.484 Orang	17.484 Orang

1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	67 orang	100 orang	0 orang	0%	100 orang	100 orang	100 orang
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	175 orang	108 orang	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	16 orang	20 orang	5 orang	25,00%	20 orang	20 orang	20 orang
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	253 orang	58 orang	75 orang	25 orang	33,33%	75 orang	75 orang	75 orang

1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani	0,44%	0,59%	0,43%	0,11%	25,58%	0,43%	0,43%	0,43%
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi	940 orang	803 orang	225 orang	51 orang	22,66%	225 orang	225 orang	225 orang
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 orang	224 orang	-	-	-	-	-	-
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	201 orang	100 orang	20 orang	20%	100 orang	100 orang	100 orang
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	325 orang	206 orang	50 orang	11 orang	22%	50 orang	50 orang	50 orang
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	172 orang	75 orang	20 orang	26,67%	75 orang	75 orang	75 orang

1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	45,63%	64,38%	45,63%	11,41%	25%	45,63%	45,63%	45,63%
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Panti Asuhan yang terpelihara	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	225 orang	35 Orang	100 Orang	22 Orang	22%	100 Orang	100 Orang	100 Orang
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	-	-	-	-	-	-	-
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang dinyatakan valid oleh Kementrian Sosial	100%	100%	95%	23,75%	25%	95%	95%	95%
		Persentase data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) yang dipadankan dengan data DTKS	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
		Tingkat Kematangan Layanan Publik	3	3	2,5	0,63	25%	2,5	2,5	2,5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	700.000 orang	539.697 Orang	600.000 orang	600.000 orang	100,00 %	600.000 orang	600.000 orang	600.000 orang
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60.000 keluarga	59.000 Keluarga	55.000 keluarga	0 keluarga	0%	55.000 keluarga	55.000 keluarga	55.000 keluarga
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.500 keluarga	7.917 Keluarga	3.350 Keluarga	991 Keluarga	29,58%	3.350 Keluarga	3.350 Keluarga	3.350 Keluarga
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	100,00%	69,32%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan permakanan dan dukungan psikososial	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
		Persentase keluarga rentan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%

1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.560 orang	6.750 orang	1.440 orang	0 orang	0%	1.440 orang	1.440 orang	1.440 orang
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 orang	30 orang	55 orang	19 orang	34,54%	55 orang	55 orang	55 orang
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	152 orang	80 orang	0 orang	0%	80 orang	80 orang	80 orang
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tagana yang terbina	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
		Persentase Tagana yang difasilitasi	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	37 orang	40 orang	37 orang	37 orang	100%	37 orang	37 orang	37 orang
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%

1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
		Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi	11 TMP	11 TMP	11 TMP	11 TMP	100%	11 TMP	11 TMP	11 TMP
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11 TMP	11 TMP	11 TMP	11 TMP	100%	11 TMP	11 TMP	11 TMP
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-

Secara umum realisasi program / kegiatan telah memenuhi target kinerja sampai dengan Triwulan I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota yang terdiri dari 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan mendapat capaian sebesar 25% hal tersebut didukung oleh SDM yang baik sehingga kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target. Selain itu, program penunjang juga merupakan kegiatan supporting yang bersifat kondisional sehingga target kinerja dapat tercapai.

Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan memiliki 3 indikator yaitu (1) Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina dengan capaian 67%, (2) Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan mendapat capaian 67% dan (3) Persentase Puskesmas yang terbentuk mendapat capaian 25%. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang memberikan pembinaan kepada TKSK, LK3, PSM, LKS, Karang Taruna yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan sekaligus mitra kerja Dinas Sosial yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pembinaan yang diberikan kepada PSKS dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi dalam menangani PPKS. Selain itu pada program ini juga terdapat santunan kehormatan bagi Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam yang sudah dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan dua indikator dengan capaian : Indikator pertama yaitu Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi memiliki capaian 80% dan indikator kedua Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan capaian 80%. Hal tersebut dikarenakan penanganan yang cepat dan tanggap Dinas Sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial PPKS baik penyandang disabilitas, Lanjut Usia, Anak Terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Dinas Sosial memiliki Tim

Reaksi Cepat yang selalu *standby* 24 jam dimana setiap pengaduan terkait penanganan PPKS akan selalu dilayani. Selain itu koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dan instansi terkait seperti Puskesmas setempat, RSUD Ibnu Sina, RSJ Menur, Panti Sosial, dan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang memberikan pelatihan dan keterampilan sehingga PPKS tersebut mendapatkan penanganan dengan baik. Selain itu Program Rehabilitasi Sosial juga merupakan salah satu program yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar bidang Sosial sehingga harus dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan mengoptimalkan SDM dan Sarana Prasarana yang ada. Pada program ini terdapat penyaluran bantuan sosial bagi Janda Miskin, Anak Yatim, permakanan lansia dan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan indikator Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapat capaian 25%. Kegiatan ini berisi bantuan permakanan bagi anak di Panti Asuhan, verifikasi, validasi dan pengelolaan data serta pemberian BLT untuk Fakir Miskin berupa PKH Inklusif dengan nominal Rp. 500.000 x 4 kali per Tahun dimana bantuan diberikan kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan apapun dan merupakan Nawa Karsa serta BLT DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dengan nominal Rp. 300.000 x 6 kali per Tahun.

Program penanganan bencana yang terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan indikator Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana memiliki capaian 25% hal itu dikarenakan pada Tahun 2025 terdapat bencana alam banjir sehingga Dinas Sosial mendirikan Dapur Umum serta mengadakan kegiatan layanan dukungan psikososial untuk membantu memperkuat faktor perlindungan bagi anak, termasuk kemampuan mereka untuk mengidentifikasi situasi yang berbahaya dan berisiko serta memfasilitasi kemampuan untuk bangkit kembali dari dampak bencana yang dialami masyarakat korban bencana

alam. Selain itu ada pemulasaran jenazah Mr. X dan pemulangan Orang Terlantar serta pembinaan bagi anggota Tagana (Taruna Siaga Bencana).

Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan indikator Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi yang memiliki capaian 25% hal ini dikarenakan pelaksanaan pemeliharaan TMP yang rutin agar TMP di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik terpelihara dengan baik. Selain itu, TMP biasanya juga digunakan untuk upacara dan ziarah tabur bunga yang dapat meningkatkan nilai kepahlawanan dan mengenang jasa para Pahlawan sehingga harus selalu terawat dan terpelihara dengan baik. Pada program ini terdapat Tali Asih yang diberikan kepada Legiun Veteran, Janda Veteran dan Perintis Kemerdekaan berupa sembako.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Sosial Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:

“Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
2. Penanganan permasalahan sosial melalui akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
3. Penyelenggaran pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial;
4. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman normas standar prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan urusan di bidang sosial;
5. Pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga dan/atau individu yang bergerak di bidang program penanganan masalah sosial;

6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik tersebut di atas dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang termuat dalam dokumen Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Gresik merumuskan kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam penentuan dan kegiatan tiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025. Untuk tahun 2025, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Review RENSTRA II Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 2.2 (T-C.30).

Tabel 2.2 (T-C.30)
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Gresik**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan		Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS (%)	50,31%	54,68%	-	-	-	58,40%	65,06%	-	-	-	
			Nilai Kabupaten Layak Lansia	75	76	-	-	-	76,1	79,5	-	-	-	
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 2.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 3.Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 4.Rehabilitasi Sosial Dasar	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	-	-	95,00%	96,00%	97,00%	-	-	113,14%	121,49%	97,00%	

		Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 5.Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota												
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	-	-	78	79	80	-	-	86,54	84,43	81	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dinas Sosial Kabupaten Gresik memiliki sasaran yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS dengan target indikator Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada Tahun 2023 sebesar 95%, Tahun 2024 sebesar 96% dan Tahun 2025 sebesar 97%. Sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dengan target indeks nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial 78 untuk Tahun 2023, 79 untuk Tahun 2024 dan 80 untuk Tahun 2025.

Realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik untuk Tahun 2023 dan 2024 telah mencapai target yaitu sebesar 113,14% dengan capaian 119,10% dan 121,49% dengan capaian 126,55%. Indikator Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 adalah 86,54 dengan capaian 110,95% dan Tahun 2024 adalah 84,43 dengan capaian 106,87%. Realisasi tersebut dapat tercapai karena didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik diantara pegawai Dinas Sosial, mitra kerja dan peran serta masyarakat. Pelayanan dan respon cepat atas pengaduan dari masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah PPKS yang bertambah, dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan sosial. Krisis ekonomi, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari dapat

menyebabkan munculnya orang-orang miskin baru dan orang-orang yang rentan dengan kemiskinan.

2. Belum optimalnya kinerja Operator Data SIKS-NG untuk menginput dan memperbarui data kemiskinan di setiap desa dan kelurahan sebagai alat yang efisien dan terpadu dalam manajemen informasi kemiskinan. Pada Tahun 2025 Dinas Sosial mengembangkan aplikasi Gresik Soya dimana aplikasi ini merupakan duplikasi Aplikasi SIKS-NG dimana dapat mengakses By Name By Address PPKS.
3. Belum optimalnya pelayanan dan penanganan PPKS. Meningkatnya jumlah PPKS di Kabupaten Gresik membuat Dinas Sosial Kabupaten Gresik harus terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan terkait penyediaan sarana prasarana dan mutu pelayanan yang memadai sesuai standar pelayanan menjadi tuntutan masyarakat yang harus diwujudkan. Penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial ke dalam pengelompokan isu-isu strategis kesejahteraan sosial terdapat berbagai jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas melalui program Gresik Bebas Pasung, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan Wanita Tuna Susila (WTS). Selain itu, belum tersedia pusat Rehabilitasi Sosial dan Panti bagi anak terlantar dan Lansia Terlantar di Kabupaten Gresik sehingga harus berkoordinasi dengan UPT milik Pemerintah Provinsi dan menunggu ketersediaan tempat agar bisa mengirim PPKS tersebut yang menyebabkan penanganan terlambat.
4. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat (PSKS). Kelembagaan sosial masyarakat dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting di samping pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, dapat berperan sebagai penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di

lingkungan masyarakat. Untuk mendukung pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dalam kerangka mendukung program pemberdayaan kelembagaan sosial, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Karang Taruna;
- b. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- c. Pemberdayaan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga);
- d. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat Kecamatan;
- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan pemberdayaan tersebut akan memperkuat potensi sumber daya kesejahteraan sosial dari kelembagaan sosial masyarakat. Peran Karang Taruna, PSM, LK3, LKS dan TKSK sangat penting untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Masih rendahnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Seiring dengan perkembangan gaya hidup individualisme dalam masyarakat secara simultan juga berkembang pergeseran nilai dalam masyarakat berupa lunturnya rasa kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian dan keharmonisan sosial serta makin rendahnya nasionalisme yang ditunjukkan dengan menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kebangsaan/kepahlawanan dan penghargaan terhadap keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna penanganan PPKS yang tepat sasaran. Masih banyak Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Fakir Miskin yang belum terdata sehingga belum tersentuh dan belum mendapatkan penanganan serta bantuan dari Pemerintah.

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan terhadap Capaian Program Nasional

Dengan tercapainya indikator kinerja Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik maka dapat mendukung visi Kabupaten Gresik yaitu Gresik Sejahtera dengan misi ke-5 yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik dengan sasaran ke-9 yaitu terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan dengan indikator kinerja Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin. Hal tersebut selaras dengan visi RPJMN 2020-2024 mengenai “Maju, Berdaulat dan Gotong Royong”.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1) Faktor Tantangan Organisasi

- a. Meningkatnya jumlah PPKS dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan sosial;
- b. Masih tingginya angka kemiskinan dan semakin berkembangnya variasi permasalahan kesejahteraan sosial yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial;
- c. Tuntutan PPKS untuk memperoleh pelayanan yang baik melalui peningkatan kinerja aparatur;
- d. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan terjadinya bencana alam dan sosial;
- e. Belum tersedianya Panti Rehabilitasi di Kabupaten Gresik sebagai lembaga penampungan rehabilitasi PMKS;
- f. Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial, seperti balita yang ditelantarkan dan HIV/ AIDS;
- g. Pendataan PPKS dan PSKS yang masih kurang membuat penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga diperlukan sistem pendataan

yang baik sehingga mendapatkan data yang valid dan dapat dijadikan sebagai acuan instansi terkait dalam pemberian bantuan;

- h. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis NIK. Namun masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Hal tersebut dapat menghambat proses pelayanan sosial;
- i. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih perlu diperluas dan ditingkatkan kualitas dan ketepatannya sebagai basis penentuan target perlindungan sosial;
- j. Pengembangan dan input data pada Aplikasi Gresik Soya
- k. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan dalam penanganan dan pelayanan PPKS serta pendataan terpadu;
- l. Masih kurang aktifnya peran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2) Faktor Peluang Organisasi

Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik antara lain yaitu :

- a. Dukungan peraturan dan perundang-undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;
- c. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan;
- d. Berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan sosial;
- e. Partisipasi masyarakat industri melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial memiliki banyak bantuan seperti bantuan PKH Inklusif (untuk lansia dan penyandang disabilitas) yang merupakan Program Nawa Karsa Gresik Seger dengan Output Kunci PKH Inklusif, penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, bantuan untuk anak yatim dan janda miskin, serta santunan bagi penjaga makam, guru ngaji dan marbot. Selain itu, pemutakhiran data juga merupakan salah satu kegiatan prioritas Nawa Karsa Gresik Seger dengan Output Kunci Gresik Satya (One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik) agar mendapatkan data yang valid, penerima manfaat tepat sasaran dan dapat dijadikan sebagai acuan instansi terkait dalam pemberian bantuan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang termuat dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 39 sub kegiatan. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 2.3 (T-C.31).

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan Perubahan RKPD Tahun 2025

Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	Rp6.521.400.574,83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian program OPD	100%	Rp6.521.400.574,83	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	Rp29.144.400	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	Rp29.144.400	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Rp22.338.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Rp22.338.400	

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	Rp3.116.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	Rp3.116.000	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	Rp3.690.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	Rp3.690.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan ASN Dinsos	100%	Rp4.744.757.002,83	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian Dinas Sosial	100%	Rp4.744.757.002,83	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	Rp4.744.757.002,83	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan	Rp4.744.757.002,83	

1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi umum	100%	Rp208.692.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian administrasi umum	100%	Rp208.692.350	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp10.000.000	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	Rp25.077.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	Rp25.077.500	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	Rp14.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	Rp14.000.000	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	Rp40.669.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	Rp40.669.300	

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Rp22.330.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	Rp22.330.000	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	43 dokumen	Rp-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	43 dokumen	Rp-	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	Rp89.190.550	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	Rp89.190.550	
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	Rp7.425.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	Rp7.425.000	

1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp864.451.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp864.451.800	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	Rp33.091.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	Rp33.091.800	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	Rp831.360.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 laporan	Rp831.360.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp674.355.022	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	Rp674.355.022	

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	Rp37.477.375	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	Rp37.477.375	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	Rp10.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	Rp10.150.000	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 unit	Rp626.727.647	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	Rp626.727.647	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibangun	97,46%	Rp3.035.513.100	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibangun	97,46%	Rp3.035.513.100	
			Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	100%				Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	100%		

			Persentase Puskesmas yang terbentuk	100%				Persentase Puskesmas yang terbentuk	100%		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang terbina	100%	Rp3.035.513.100	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang terbina	100%	Rp3.035.513.100	
			Jumlah PSKS yang difasilitasi	13 lembaga				Jumlah PSKS yang difasilitasi	13 lembaga		
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Gresik	40 orang	Rp451.750.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Gresik	40 orang	Rp451.750.000	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	18 orang	Rp108.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	18 orang	Rp108.000.000	

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	13 lembaga	Rp2.397.763.100	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	13 lembaga	Rp2.397.763.100	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Gresik	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 sertifikat	Rp78.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Gresik	Jumlah Sertifikat dan fasilitasi Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten Gresik	2 sertifikat	Rp78.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	0,35%	Rp4.672.321.450	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	0,35%	Rp4.672.321.450	

			Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2,80%				Persentase PMKS yang dirujuk	2,80%		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang tertangani	1,40%	Rp4.529.827.601	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang tertangani	1,40%	Rp4.529.827.601	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	25.725 orang				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	25.725 orang		
			Nilai Kabupaten Layak Lansia	79				Nilai Kabupaten Layak Lansia	79		

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	Rp190.173.500	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	Rp190.173.500	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25.500 orang	Rp4.243.225.651	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25.500 orang	Rp4.243.225.651	

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	100 orang	Rp27.655.450	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	100 orang	Rp27.655.450	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	Rp17.112.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	Rp17.112.000	

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Rp51.661.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Rp51.661.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani	0,43%	Rp142.493.849	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani	0,43%	Rp142.493.849	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi	225 orang				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi	225 orang		
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	Rp85.616.795	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	Rp85.616.795	

1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	Rp30.056.527	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gresik	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	Rp30.056.527	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Rp26.820.527	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gresik	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	Rp26.820.527	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	45,63%	Rp10.490.482.700	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	45,63%	Rp10.490.482.700	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase Panti Asuhan yang terpelihara	100%	Rp101.328.800	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase Panti Asuhan yang terbina	100%	Rp101.328.800	

1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Gresik	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	100 anak	Rp101.328.800	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Gresik	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau di Panti Asuhan	100 anak	Rp101.328.800	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data DTKS yang dinyatakan valid oleh Kementerian Sosial	95%	Rp10.389.153.900	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data DTKS yang dinyatakan valid oleh Kementerian Sosial	95%	Rp10.389.153.900	
			Persentase data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dipadankan dengan data DTKS	100%				Persentase data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dipadankan dengan data DTKS	100%		
			Tingkat Kematangan Layanan Publik	2,5				Tingkat Kematangan Layanan Publik	2,5		

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	600.000 orang	Rp49.272.900	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	600.000 orang	Rp49.272.900	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	55.000 keluarga	Rp18.001.400	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	55.000 keluarga	Rp18.001.400	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gresik	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.350 keluarga	Rp10.321.879.600	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gresik	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.350 keluarga	Rp10.321.879.600	

1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	100,00%	Rp400.591.300	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	100,00%	Rp400.591.300	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan permakanaan dan dukungan psikososial	100%	Rp157.377.600	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan permakanaan dan dukungan psikososial	100%	Rp157.377.600	
			Persentase keluarga rentan yang mendapatkan penanganan	100%				Persentase keluarga rentan yang mendapatkan penanganan	100%		
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.440 orang	Rp95.540.400	Penyediaan Makanan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten Gresik	1.440 orang	Rp95.540.400	

1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	Rp40.900.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	Rp40.900.000	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Gresik	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	Rp20.937.200	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Gresik	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten Gresik	80 orang	Rp20.937.200	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Tagana yang terbina	100%	Rp243.213.700	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Tagana yang terbina	100%	Rp243.213.700	
			Persentase Tagana yang difasilitasi	100%				Persentase Tagana yang difasilitasi	100%		

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	37 orang	Rp243.213.700	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gresik	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Gresik	37 orang	Rp243.213.700	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	Rp363.550.200	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	Rp363.550.200	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	Rp363.550.200	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100%	Rp363.550.200	
			Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi	11 TMP				Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi	11 TMP		

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp19.942.000	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp19.942.000	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11 Makam	Rp343.608.200	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11 Makam	Rp343.608.200	
TOTAL					Rp 25.483.859.324,83	TOTAL					Rp 25.483.859.324,83

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang diperoleh langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 , untuk kemudian disepakati dan dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.32).

Tabel 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD				Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	
1	2	3	4	5	6
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Pemeliharaan Talang, Genteng dan Atap Kantor Dinas Sosial Kab. Gresik
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	
			Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi	11 TMP	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gresik	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 TMP	Hibah Tembok Pagar Poesponegoro

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Tahun 2025, Dinas Sosial memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut (Tabel 2.8):

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. GRESIK
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangk at Daerah Penang gung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebe lum	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						DINAS SOSIAL							23.471.273.438	25.303.677.710,83	25.483.859.324,83					42.240.810.900					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.471.273.438	25.303.677.710,83	25.483.859.324,83					42.240.810.900					
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							23.471.273.438	25.303.677.710,83	25.483.859.324,83					42.240.810.900					
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Program OPD				-	100 %	5.386.575.934	6.193.588.706,83	6.521.400.574,83							7.691.244.000			
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	-			-	100 %	45.963.829	43.744.829,00	43.744.829,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Pengt asan kemiskin an inklusif, partisipa tif dan bersasar an	Dinas Sosial Kab. Gresik		91.500.000	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokume n	6 Dokumen	30.388.603	26.033.603,00	22.338.400,00	Kab. Gresik, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan	Pengt asan kemiskin an inklusif, partisipa tif dan bersasar an			39.000.000	DINAS SOSIAL		

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	6.575.226	6.311.226,00	3.116.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			12.500.000	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	9.000.000	11.400.000,00	3.690.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			40.000.000	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan ASN Dinsos	-			-	100 %	4.007.744.230	4.744.757.002,83	4.744.757.002,83			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	Pegawai Dinas Sosial Kab. Gresik		4.800.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.007.744.230	4.744.757.002,83	4.744.757.002,83	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			4.800.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	-		151.250.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			151.250.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi umum	-			-	100 %	270.169.053	274.402.053,00	274.402.053,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	Pegawai Dinas Sosial Kab. Gresik		977.220.000	DINAS SOSIAL

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	40.674.040	40.674.040,00	40.669.300,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			118.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.319.138	22.330.013,00	22.330.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			69.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			7.320.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	144.973.000	144.973.000,00	89.190.550,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			385.900.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.425.000	7.425.000,00	7.425.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			100.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	Dinas Sosial Kab. Gresik		428.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			428.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercakupnya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	100 %	796.465.800	864.451.800,00	864.451.800,00			Membangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	Pegawai Dinas Sosial Kab. Gresik		808.374.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	33.091.800	33.091.800,00	33.091.800,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			48.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	26 Laporan	763.374.000	831.360.000,00	831.360.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			760.374.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	-		-	100 %	266.233.022	266.233.022,00	266.233.022,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	Dinas Sosial Kab. Gresik		434.400.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	37.477.375	37.477.375,00	37.477.375,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			199.600.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	10.150.000	10.150.000,00	10.150.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran				39.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	1 Unit	218.605.647	218.605.647,00	626.727.647,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran				195.300.000	DINAS SOSIAL
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibangun				-	100 97,46 %	2.893.473.200	2.933.473.200,00	3.035.513.100,00								5.397.720.000	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan sumbangan sesuai aturan yang berlaku Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah	-			-	100 % 4 kali	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	Masyarakat		70.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			70.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang difasilitasi Persentase PSKS yang terbina	-			-	100 % 13 Lembaga	2.893.473.200	2.933.473.200,00	2.933.473.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	PSKS di Kabupaten Gresik		5.327.720.000	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	455.501.348	455.501.348,00	451.750.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			60.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	18 Orang	108.000.000	108.000.000,00	108.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			114.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Lembaga	13 Lembaga	2.251.971.852	2.291.971.852,00	2.397.763.100,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			4.994.820.000	DINAS SOSIAL

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kot a					1 Serti fikat	1 Sertifik at	78.000.000	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Pengent asan kemiskin an inklusif, partisipa tif dan bersasar an			158.900.000	DINAS SOSIAL
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				-	0,35 2,80 % %	5.008.398.176	4.938.398.176,00	4.672.321.450,00								12.068.500.000	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi Nilai Kabupaten Layak Lansia Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang tertangani	-			-	1,40 % 41793 Orang 79 Nilai	4.778.466.327	4.708.466.327,00	4.708.466.327,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Pengent asan kemiskin an inklusif, partisipa tif dan bersasar an	PPKS di Kabup aten Gresik			10.938.500.000	DINAS SOSIAL

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	191.558.500	191.558.500,00	190.173.500,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			500.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				2550 Orang	25500 Orang	4.471.945.527	4.401.945.527,00	4.243.225.651,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			9.288.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	34.921.250	34.921.250,00	27.655.450,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			350.000.000	DINAS SOSIAL

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			125.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	24.807.000	24.807.000,00	17.112.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			325.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan																

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					75 Orang	75 Orang	55.234.050	55.234.050,00	51.661.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			350.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani	-			-	0,43 % 855 Orang	229.931.849	229.931.849,00	229.931.849,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	PPKS di Kabupaten Gresik			1.130.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			85.000.000	DINAS SOSIAL	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	102.776.795	102.776.795,00	85.616.795,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			385.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	55.014.527	55.014.527,00	30.056.527,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			400.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan																	
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	72.140.527	72.140.527,00	26.820.527,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			260.000.000	DINAS SOSIAL

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial				-	45,63 %	9.561.542.815	10.610.523.115,00	10.490.482.700,00								16.259.846.900	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Persentase Panti Asuhan yang terbina	-			-	100 %	162.737.715	162.737.715,00	162.737.715,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Pengent asan kemiskin an inklusif, partisipa tif dan bersasar an	Anak di Panti Asuha n			380.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
							Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kot a				100 Oran g	100 Orang	162.737.715	162.737.715,00	101.328.800,00	Kab. Gresik, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Pengent asan kemiskin an inklusif, partisipa tif dan bersasar an				140.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

						Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			240.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang dinyatakan valid oleh Kementerian Sosial Persentase data P3KE (Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dipadankan dengan data DTKS Tingkat Kematangan Layanan Publik	-		-	100 % 2,5 Nilai 95 %	9.398.805.100	10.447.785.400,00	10.447.785.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	Fakir Miskin		15.879.846.900	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				600000 Orang	600000 Orang	52.792.800	52.792.800,00	49.272.900,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			160.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					55000 Keluarga	55000 Keluarga	42.493.575	42.493.575,00	18.001.400,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			266.200.000	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					3350 Keluarga	4645 Keluarga	9.303.518.725	10.352.499.025,00	10.321.879.600,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			15.453.646.900	DINAS SOSIAL
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana				-	100 %	424.099.785	430.510.985,00	400.591.300,00								270.000.000	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase keluarga rentan yang mendapatkan penanganan penanganan Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan permakanaan dan dukungan psikososial	-			-	100 %	159.429.185	165.840.385,00	165.840.385,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Pengent asan kemiskin an inklusif, partisipa tif dan bersasar an	Korba n Benca na Alam dan Sosial		185.000.000	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kot a				1440 Oran g	1440 Orang	100.310.845	100.310.845,00	95.540.400,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Pengent asan kemiskin an inklusif, partisipa tif dan bersasar an			75.000.000	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kot a				55 Oran g	49 Orang	34.963.500	41.374.700,00	40.900.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan .	Pengent asan kemiskin an inklusif, partisipa tif dan bersasar an			60.000.000	DINAS SOSIAL	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	24.154.840	24.154.840,00	20.937.200,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			50.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tagana yang difasilitasi Persentase Tagana yang terbina	-			-	100 %	264.670.600	264.670.600,00	264.670.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	Tagana (PSKS)		85.000.000	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																	
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Orang	37 Orang	264.670.600	264.670.600,00	243.213.700,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			85.000.000	DINAS SOSIAL

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi				-	100 %	197.183.528	197.183.528,00	363.550.200,00							553.500.000	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara dan direhabilitasi Persentase TMP yang terpelihara	-			-	100 % 11 TMP	197.183.528	197.183.528,00	197.183.528,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	TMP di Kab. Gresik		553.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	23.646.878	23.646.878,00	19.942.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			53.500.000	DINAS SOSIAL
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				11 Makam	11 Makam	173.536.650	173.536.650,00	343.608.200,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			450.000.000	DINAS SOSIAL

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran			50.000.000	DINAS SOSIAL
	J U M L A H											23.471.273.438	25.303.677.710,83	25.483.859.324,83							42.240.810.900		

BAB IV PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja Perubahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Perubahan RKPD dan RKA Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025;
2. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Gresik terikat untuk menjadikan Renja Perubahan ini sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
3. Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam Renja Perubahan ini.

Gresik, Juli 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19740825 200604 2 016